

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai landasan dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini sehingga penulis dapat memperluas pemahamannya terhadap teori-teori yang digunakan dalam meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang pengolahan masyarakat yang terparap bencana alam pasca bencana. Penelitian sebelumnya dapat memudahkan penulis dalam mengidentifikasi langkah-langkah sistematis yang membantu mengatur penelitiannya. Dari sini, peneliti mencoba menghubungkan beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi pedoman penting bagi penelitian lanjutan mengenai keterlibatan *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) Jawa Timur dalam tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardianto Hawing dengan judul “*Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Makassar” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memiliki persamaan dalam membahas tentang sistem penanggulangan bencana yang di dalamnya juga terdapat fase respon tanggap darurat dan rehabilitasi (Hawing, 2021). Namun dari beberapa indikator diatas ada beberapa hal yang belum bisa

teratasi karena ada beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana merupakan kebijakan instansi pemerintah seperti tahapan rekonstruksi bangunan masyarakat. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang yaitu MDMC tidak berpartisipasi secara totalitas karena terdapat kendala baik dari kapasitas sumber daya dan pendanaan serta pada penelitian sebelumnya tidak menjelaskan tahapan penanggulangan bencana yang sistematis. Sedangkan penelitian yang saat ini MDMC dapat berpartisipasi secara totalitas dan sistematis disamping itu sumber daya yang dimiliki MDMC Jawa Timur terpenuhi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kiki Rasmala Sani yang berjudul “Peran Lembaga Muhammadiyah dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Sinjai”, pada penelitian ini sama-sama membahas terdapat upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh MDMC dan juga menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan berfokus pada mitigasi yang dilakukan terhadap kader-kader Muhammadiyah guna pengembangan potensi yang ada, sedangkan peneliti pada saat ini berfokus pada pelayanan bencana yang dilakukan oleh MDMC terhadap korban yang terdampak bencana (Sani & Syamsuddin, 2020). Penelitian sebelumnya membahas terkait partisipasi MDMC Kabupaten Sinjai yang belum melaksanakan program kerja mitigasi bencana akibat beberapa kendala pada kesepahaman anggota, padahal program mitigasi penting di siapkan untuk kesiapsiagaan pada saat terjadi bencana guna mengurangi resiko terdampak. Perbedaan pada peneliian

saat ini pada MDMC Jawa Timur kapasitas sumber daya relawan dominan terpenuhi sehingga saat terjadi bencana sudah siap untuk melakukan giat respon tanggap darurat sehingga memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam situasi bencana.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri Agina W. dengan judul “Peran Muhammadiyah Disaster Management Center Dalam Mitigasi Bencana”, pada penelitian memiliki persamaan membahas terdapat upaya penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh MDMC dan juga menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pada penelitian yang dilakukan berfokus dalam penanggulangan bencana, namun pada intervensi yang dilakukan tidak menyeluruh untuk sektor layanannya. Sedangkan peneliti berfokus pada respon tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh MDMC terhadap korban yang terdampak bencana gempa bumi Cianjur bersifat menyeluruh untuk sektor layanan yang dilakukan (Suwaryo et al., 2020). Pada penelitian ini peneliti berfokus pada penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Kebumen. Mitigasi yang dilakukan melalui pembangunan kesadaran masyarakat akan menghadapi bahaya bencana dengan peningkatan kapasitas pada masyarakat pesisir. Perbedaan dari penelitian saat ini masyarakat Kabupaten Cianjur belum memiliki kapasitas tangguh bencana dan juga struktur bangunan pemukiman tidak sesuai dengan struktur wilayah yang dihuni sehingga menyebabkan banyak korban jiwa akibat dampak dari gempa bumi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Sakban, Maemunah, Hafsah dengan judul “Peran MDMC Dalam Pelayanan Pendidikan Dan Psikososial Untuk Anak Terdampak Gempa Bumi Di Kabupaten Lombok Utara”, pada penelitian ini sama-sama membahas peranan MDMC dan juga menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini MDMC berperan dalam layanan pendidikan dan psikososial memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat terdampak. Untuk sektor pendidikan lebih fokus memberikan pembinaan dan motivasi terhadap anak-anak yang terdampak bencana. Pada penelitian ini membahas terkait peran MDMC, tetapi peran tersebut hanya berfokus pada layanan pendidikan dan psikososial (Sakban et al., 2020). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan pada saat ini peran MDMC terhadap seluruh sektor layanan mulai dari kesehatan, pendidikan, psikososial dan juga sektor hunian.

Kelima, penelitian oleh Syarifuddin yang berjudul “Strategi Muhammadiyah Disaster Manajement Center (MDMC) dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bima pada Bulan April Tahun 2021”, pada penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas peranan Muhammadiyah yang di dalamnya juga terdapat upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh MDMC. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian yang dilakukan ini berfokus pada kegiatan penanggulangan bencana namun, intervensi yang dilakukan sifatnya terbatas karena keterbatasan potensi sumber daya manusia yang memiliki kapasitas tanggap darurat

dilapangan. Sedangkan peneliti pada saat ini berfokus pada keseluruhan sektor layanan yang dilakukan oleh MDMC (Syarifuddin et al., 2022). Tahapan penanggulangan bencananya yaitu Mitigasi, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi. Pada penelitian ini ada beberapa faktor menghambat dalam penanganan bencana sehingga menyulitkan proses intervensi, maka masih banyak beberapa hal yang belum tertangani dan juga beberapa sektor yang merupakan wewenang pemerintah dan juga kurangnya kapasitas relawan dapat mempersulit jalannya proses respon tanggap darurat. Perbedaan dengan penelitian yang saat ini yaitu pada penelitian saat ini memiliki sumber daya yang cukup, baik dari kapasitas relawan dan juga peralatan serta yang menjadi perbedaan adalah lokasi penelitian yang mana perbedaan wilayah beda pula karakteristik bencananya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, semua memiliki persamaan menjelaskan tentang penanggulangan bencana yang dilakukan oleh MDMC. Begitu pula dengan penelitian pada saat ini. Namun pada penelitian saat ini memiliki konsep “Partisipasi *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) dalam Respon Tanggap Darurat Bencana Pasca Gempa Bumi Kabupaten Cianjur”. Oleh karena itu peneliti membahas tentang bentuk Partisipasi *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) dalam Respon Tanggap Darurat Bencana Pasca Gempa Bumi Kabupaten Cianjur menjadi hal yang dapat menguatkan argumentasi terkait partisipasi MDMC dalam upaya tanggap darurat bencana gempa bumi yang berada di Kabupaten Cianjur. Dengan

adanya partisipasi, masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi bencana yang juga merupakan program yang dilakukan oleh MDMC untuk penguatan kapasitas relawan agar nantinya dapat melancarkan program tanggap darurat. Pada fase tanggap darurat memerlukan sinergitas baik dari pihak luar dan juga masyarakat agar berjalan sebagaimana semestinya.

B. Konsep Bencana

1. Definisi Bencana

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dikatakan sebuah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengganggu fungsi masyarakat dan menyebabkan rusaknya lingkungan secara langsung, kerugian ekonomi, dan sumber daya lainnya. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang sifatnya mengancam dan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun faktor manusia hingga menimbulkan korban jiwa, dampak lingkungan dan harta benda, serta dampak psikologis.

Beragam bencana yang pernah ada di Indonesia. Jenis-jenis bencana sendiri dibagi menjadi beberapa yaitu :

- a. Bencana alam merupakan peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- b. Bencana nonalam adalah peristiwa yang disebabkan oleh nonalam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan bentuk teror.

Bencana - bencana di Indonesia digolongkan menjadi tiga bagian yaitu bencana geologi, meteorologis, dan anthropogenis. 1) Bencana Geologis sendiri merupakan peristiwa dengan periode waktu yang berulang. Jenis bencana alam geologi yang sering terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, dan tanah longsor (Hubeis & Najib, 2014). Fenomena alam ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga strategi penanganannya tidak bisa seragam meskipun jenis bencana yang sama, 2) Bencana Meteorologis ini bencana yang berkaitan dengan interaksi atau aktivitas manusia seperti banjir, gelombang laut, kebakaran hutan, dan kekeringan. 3) Bencana Anthropogeni merupakan peristiwa yang terjadi secara langsung karena unsur kesalahan manusia yang berdampak luas pada lingkungan disekitarnya, seperti kerusakan industri, kecelakaan transportasi, terorisme, sabotase, dan konflik sosial.

2. Manajemen Bencana

Penanggulangan bencana yang disebut juga dengan manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang bersifat dinamis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang dilakukan sebelum, pada

saat, atau setelah terjadinya bencana hingga pada masa pascabencana. yang bertujuan untuk menghindari bencana, mengurangi dampak kerugian dan memulihkan kondisi yang terdampak (Rusli & 'Ulya, 2018). Kegiatan yang dilakukan dalam masa penanggulangan bencana meliputi :

- Pra Bencana

Pada tahapan ini penanggulangan bencana dibagi menjadi saat tidak terjadi bencana dan potensi terjadi bencana. Pada kondisi tidak terjadi bencana hal yang perlu dilakukan pada meliputi perencanaan penanggulangan, pengurangan risiko bencana, upaya pencegahan bencana, pemanduan pembangunan sarana dan prasarana, pelaksanaan rencana tata ruang, peningkatan kapasitas, analisis risiko bencana, dan persyaratan standar teknis upaya penanggulangan bencana. Pada saat potensi terjadinya bencana, pelaksanaan upaya penanggulangan bencana meliputi: kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Mitigasi bencana dengan mengumpulkan informasi dan analisis data bencana bertujuan memperkecil risiko terhadap bencana. Kesiapsiagaan merupakan prediksi kejadian bencana dengan pemantauan adanya tanda-tanda bahaya, adanya sistem peringatan dini, sistem evakuasi.

- Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah fase yang dilakukan segera setelah terjadinya bencana untuk mengatasi dampak buruknya dan mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan infrastruktur dan fasilitas. Yang terpenting pada tahap ini adalah penyelamatan korban, termasuk pencarian dan evakuasi korban, serta pemberian bantuan kepada korban, termasuk bantuan logistik, bantuan medis, dan pelayanan sosial.

- Pasca Bencana

Tahap ini melakukan rehabilitasi pada wilayah terdampak yang mengalami kerusakan akibat peristiwa yang terjadi. Setelah melakukan rehabilitasi maka hal selanjutnya dilakukan adalah rekonstruksi atau pembangunan dan penataan kembali lahan bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik hingga berjalan secara wajar dan normalnya kehidupan masyarakat. Rekonstruksi adalah tahapan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum untuk menyongsong aspek perekonomian, sosial dan budaya, hukum, ketertiban serta keberfungsian masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana

Prinsip penanggulangan bencana dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 sebagai berikut :

- a. Cepat dan tepat

Merupakan bentuk reaksi yang perlu dilaksanakan dalam penanggulangan bencana secara responsif dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas

Prioritas dalam situasi darurat bencana yang dimaksud adalah jika terjadi bencana harus mengetahui situasi dan kondisi dalam keselamatan untuk mengutamakan yang terpenting dan kerentanan.

c. Koordinasi dan keterpaduan

Pada penanggulangan bencana memerlukan komunikasi yang baik sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik dan memerlukan dukungan. Begitupula dengan keterpaduan, melaksanakan kegiatan memerlukan kerjasama yang baik dan saling mendukung atau sering disebut dengan sinergitas.

d. Berdaya guna dan berhasil guna

Dalam menangani masalah yang ada pada masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan serta yang terpenting adalah keberhasilan yang berguna.

e. Transparansi dan akuntabilitas

Giat penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan jelas dan terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan etik dan hukum.

f. Kemitraan

Giat penanggulangan bencana membutuhkan sinergitas dari mitra pada saat pelaksanaan kegiatan baik masyarakat maupun lembaga lainnya.

g. Pemberdayaan

Kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana yang bertujuan untuk kelayakan hidup masyarakat kondisi pasca bencana dengan memberikan pembelajaran dan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat.

h. Nondiskriminatif

Dalam penanggulangan bencana tidak memandang ras dan golongan, sehingga memberikan rasa adil. Dengan tidak melakukan tindakan yang berbeda terhadap perbedaan gender, suku, ras, agama, maupun politik apapun.

i. Nonproletisi

Giat penanggulangan bencana tidak diperbolehkan melakukan penyebaran agama maupun aliran yang diyakini di situasi darurat bencana, terutama melalui pemberian dukungan baik bentuk bantuan logistik, tenaga dan pelayanan darurat bencana.

C. Konsep Partisipasi

1. Definisi Partisipasi

Partisipasi merupakan sebuah keterlibatan seseorang baik emosi dan mental yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap suatu kegiatan. Menurut Fithriadi dalam Agus Purbathin Hadi (2010) Partisipasi adalah poin utama dari pendekatan keberlanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan proses interaktif yang terus berkembang. Partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan dan keterkaitan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam seluruh

proses kegiatan yang bersangkutan, baik karena alasan internal maupun eksternal.

Menurut Isbandi dalam Wahyuni (2019) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan dalam proses pengidentifikasian masalah, potensi, dan kebutuhan, pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah sebagai alternatif solusi, dan proses evaluasi terhadap perubahan yang terjadi. Partisipasi dalam masyarakat dapat memberikan dampak yang baik, karena masyarakat telah terlatih secara baik. Menurut Abe dalam Agus Purbathin Hadi (2010) bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung memberikan dampak positif terhadap masyarakat itu sendiri yaitu 1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, sehingga mendapatkan kejelasan dari apa yang diharapkan dan disetujui masyarakat; 2) Memberikan nilai positif pada tahap perencanaan; 3) Meningkatkan bentuk kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam berpolitik.

2. Karakteristik Partisipasi

Menurut Prety, J. dalam Agus Purbathin Hadi (2010) Karakteristik Partisipasi ada tujuh yaitu :

1. Partisipasi Pasif

Bentuk partisipasi yang karakteristik masyarakatnya menerima pemberitahuan dari apa yang sedang terjadi. Namun tanggapan masyarakat pada partisipasi ini tidak diperhatikan.

2. Partisipasi Informatif

Partisipasi ini mendorong masyarakat untuk berkontribusi hanya menjawab pertanyaan dan tidak terlibat pada proses program.

3. Partisipasi Konsultatif

Bentuk partisipasi masyarakat dengan cara berkonsultasi dan terdapat pihak lain yang mendengarkan proses konsultasi tersebut, namun pada kesempatan ini masyarakat belum memiliki peluang untuk merumuskan keputusan yang mufakat.

4. Partisipasi Intensif

Bentuk partisipasi dengan sukarelawan untuk memperoleh intensif tidak terlibat dalam sistem kegiatan yang akan dilaksanakan.

5. Partisipasi Fungsional

Masyarakat membentuk sekumpulan beberapa individu untuk dapat terlibat dalam suatu proyek dengan kesepakatan bersama untuk melatih kemandirian masyarakat dengan cara bertahap.

6. Partisipasi Interaktif

Bentuk partisipasi dalam proses analisis untuk perumusan kegiatan dan kelembagaan dengan terstruktur dan sistematis, sehingga masyarakat dapat berkontribusi penuh dalam proses kegiatan.

7. Mandiri

Masyarakat berinisiatif secara bebas untuk merubah nilai atau sistem yang mereka junjung, sehingga masyarakat dapat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Keikutsertaan masyarakat merupakan manifestasi terhadap peran masyarakat dalam mendukung suatu perubahan sosial melalui hubungan antara masyarakat dan suatu wilayah. Sehingga hubungan timbal balik yang ada merupakan ketergantungan dalam upaya peningkatan atau kemajuan suatu wilayah agar mencapai kesejahteraan.

3. Indikator Partisipasi

Menurut Oakley (1991) indikator partisipasi ada tiga yang terdapat pada masyarakat yaitu :

a. Adanya kontribusi

Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses kegiatan

b. Adanya pengorganisasian

pembentukan kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses kegiatan yang berguna untuk menampung partisipasi masyarakat dengan sistematis.

c. Peran dan aksi masyarakat

Adanya penyampaian pendapat dalam pengambilan keputusan.

D. Tanggap Darurat Bencana

1. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah fase yang dilakukan secara responsif pada saat terjadi untuk mengatasi dampak yang disebabkan

antara lain penyelamatan, pencarian dan evakuasi, memenuhi kebutuhan dasar, melindungi, membangun pengungsian, serta pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak. Menurut Coppola (1989) respon tanggap darurat adalah upaya untuk mengurangi cedera, kehilangan nyawa dan harta benda. Respon tanggap darurat dilakukan ketika muncul ancaman bahaya dan selesai setelah ancaman bahaya berhenti (Adiyoso, 2018).

Terdapat tiga fase dalam pengelolaan bencana pada saat tanggap darurat :

1) Pre Hazard (Sebelum Terjadi Bencana)

Fase dimana sebelum terjadi bencana namun tanda-tanda bencana telah muncul dan akan segera terjadi. Tanggap darurat dimulai ketika telah ditetapkan usaha tanggap darurat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Dengan teknologi yang ada dapat memudahkan dalam penyebaran informasi peringatan bahaya yang mana juga merupakan fokus dari fase tanggap darurat. Terdapat tiga jenis tindakan yang perlu dilakukan pada fase tanggap darurat : 1) peringatan bahaya dan evakuasi, 2) penyiapan sumber daya, 3) mitigasi dan kesiapsiagaan.

2) Saat Terjadi Bencana

Fase tanggap darurat berjalan saat pemerintahan menetapkan kondisi darurat bencana. Kendala yang terjadi jika kondisi darurat tidak segera diketahui akan mengakibatkan resiko yang lebih besar, berikut beberapa alasan keadaan darurat tidak

segera dikenali : a) ruang lingkup bencana tidak diprioritaskan, b) dampak awal bencana yang tidak terdeteksi, c) dampak awal bencana disembunyikan dari pihak yang berwenang, d) gangguan efisiensi atau kurangnya fasilitas komunikasi.

3) Bencana Telah Berhenti

Prioritas pertama adalah penyelamatan masyarakat untuk menghindari lebih banyak korban terdampak. Kegiatan ini mencakup *search and rescue*, penanganan pertama, dan evakuasi yang dapat berlangsung lamanya tergantung jenis dan tingkat keparahan bencana. Pada periode ini upaya yang dilakukan sebagai berikut : a) pencarian dan penyelamatan korban, b) pertolongan pertama berdasarkan tingkat Triase, c) Evakuasi, d) mengeleminasi dampak dan mengatasi bencana.

2. Prinsip Tanggap Darurat

Menurut Adiyoso (2018) terdapat empat prinsip yang menjadi dasar perlindungan terhadap bencana yang ditetapkan sebagai tindakan untuk memberi bantuan kemanusiaan, yaitu pada saat tanggap darurat bencana. Tindakan yang dilakukan erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kegiatan terkait perlindungan dari lembaga tanggap darurat dapat diklasifikasikan secara luas dalam beberapa prinsip sebagai berikut.

- a) Hindari bahaya atau ancaman lebih lanjut
- b) Jaminan akses terhadap bantuan yang bersifat imparisial
- c) Melindungi penduduk yang terkena bencana dan kekerasan

- d) Mendukung pemenuhan hak-hak asasi, akses terhadap bantuan, dan pemulihan kekerasan.

E. MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center)

Lembaga penanggulangan bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dikenal sebagai *Muhammadiyah Disaster Management Center* atau disingkat sebagai MDMC didirikan pada tahun 2007 yang dikenal dengan “Pusat Penanggulangan Bencana” kemudian diresmikan menjadi lembaga yang bertugas untuk mengelola dan menkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah oleh Pimpinan Pusat (PP) setelah Mukhtamar pada tahun 2010. MDMC bergerak di bidang penanggulangan bencana mulai dari mitigasi bencana dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. MDMC bergerak berdasarkan kode etik relawan kemanusiaan dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara internasional. MDMC juga mengembangkan misinya dalam pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan yang selaras dengan *Hygo Framework for Action* di tingkat komunitas, sekolah, dan rumah sakit yang mana merupakan gerakan Muhammadiyah yang sudah ada sejak 100 tahun lalu. MDMC menjalankan misinya di seluruh wilayah nusantara. Badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah mengembangkan MDMC di tingkat provinsi yang disebut dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan MDMC di tingkat kabupaten atau kota dikenal dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) (Budi Setiawan, 2022).

Status fase tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Cianjur mendorong persyarikatan Muhammadiyah sebagai lembaga yang selama ini berpartisipasi dalam menangani respon bencana alam baik dalam negeri maupun luar negeri dengan memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung terhadap masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Cianjur melalui MDMC dengan sistem OMOR (*One Muhammadiyah One Response*). Sistem ini bergerak satu komando yang berarti seluruh lembaga yang berada dibawah naungan Muhammadiyah dalam satu komando dengan misi kemanusiaan seperti Lembaga Amal dan Usaha, Rumah Sakit, lembaga pendidikan dan lainnya. MDMC bersama seluruh lembaga di internal Muhammadiyah maupun dengan berbagai lembaga eksternal, bahu membahu melakukan upaya penanganan dampak bencana tersebut (LPBM, 2019).

